



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL Pencarian dan
PERTOLONGAN /BASARNAS)

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 2 september 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.00 WIB s.d 18.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 s.d bulan Agustus 2021 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN A. 2022.
Ketua Rapat	: H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, S.H
Hadir Anggota	: ... dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi DDTT, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada hari ini adalah Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2022.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tentang capaian serapan APBN TA 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	UNIT KERJA	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
1.	Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (Per 31 Agustus 2021)	43,56%	44,15%
2.	Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Per 31 Agustus 2021)	31,05%	31,96%
3.	Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Per 31 Agustus 2021)	43,92%	46,84%
4.	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Per 31 Agustus 2021)	36,01%	46,81%

2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Kerja Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Dalam ribuan rupiah

NO	UNIT KERJA	PAGU KEBUTUHAN TA 2022	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2022	SELISIH
		A	B	A-B
1.	Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	5.129.463.020	209.867.125	4.919.595.895
2.	Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.447.084.648	320.538.248	1.126.546.400
3.	Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	210.749.394	82.590.648	128.158.746
4.	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	817.214.686	313.508.214	503.706.472

Selanjutnya, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan peningkatan anggaran Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sesuai dengan mekanisme dan proses pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

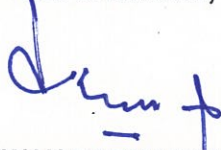
3. Komisi V DPR RI dan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan; Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

Jakarta, 2 September 2021

KETUA RAPAT,



ANDI IWAN DARMAWAN ARAS

DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



SUGITO

DIRJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



HARLINA SULISTYORINI

DIRJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



EKO SRI HARYANTO

DIRJEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI



Rr. AISYAH GAMAWATI